

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NAGARI GUNUNG BUNGKUK
LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

BINTANG MUHAMMAD IQBAL

2010012111091

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG

HATTA PADANG

2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 10/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Bintang Muhammad Iqbal
NPM : 2010012111091
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari Gunung Bungbuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Selasa tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)

2. Nurbeti, S.H., M.H

3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

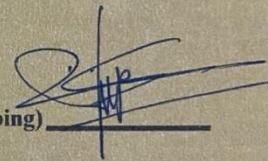
PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 10/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Bintang Muhammad Iqbal
NPM : 2010012111091
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dinas Sosial
Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari
Gunung Bungkok Lumbo Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Tiga Satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)



**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NAGARI GUNUNG BUNGKUK
LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Bintang Muhammad Iqbal¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: bintangmiq2001@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Salah Satu Tugas dan Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan adalah menanggulangi Kemiskinan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Nagari Gunung Bungbuk Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Nagari Gunung Bungku Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan di Nagari Gunung Bungbuk Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan? Jenis Penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, data di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Sosial: membuat Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial, BPJS Gratis, Bantuan Langsung Tunai. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial adalah Data Penduduk yang Tidak Valid, Verifikasi Lapangan, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kendala Teknologi dalam Program Kesejahteraan Masyarakat, Ketidakpartisipan Masyarakat dan Faktor Geografis. 3) Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial lebih meningkatkan hubungan kerja sama dan skill Pendamping Program.

Kata Kunci : Dinas Sosial, Penanggulangan, Kemiskinan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NAGARI GUNUNG BUNGKUK LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

Berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus seorang Rasul Muhammad SAW yang senantiasa menjadi contoh teladan dan penyempurna akhlak manusia serta menjadi guru sejati bagi sekalian umat manusia, semoga Allah SWT selalu menyampaikan shalawat dan salam serta rindu kita kepada beliau, Allahumma Shalli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H. selaku Pembimbing.

Kemudian penulis mengucapkan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Bapak **Prof. Dr. Dra. Diana Kartika M.Hum**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag M.H.**
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu **Nurbeti S.H, M.H.**
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staff Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bapak **Rahmadi.**
9. Teristimewa kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ayahanda **Yaprindo Muchtar** dan Ibunda **Dewi Gusti Suryani.** Terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, semangat, motivasi, pengorbanan dan selalu mendukung apapun yang penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Saudara kandung saya tercinta dan terkasih, drg, Aprilia Jewita Putri, Widya Zikrillah S.gz dan Dinda Meitrya S.T yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis saatn penelitian.
11. Sindi Wirda Afriani yang selalu memberikan support dan menemani penulis dalam melakukan peneltian dari awal hingga skripsi ini selesai.
12. Sahabat Dinda Maulia Ibrahim, Ryan Ronaldo Putra Nababan, Maya Aulia Sari, Muhammad Alfi Al Furqon Dezi Putra, Fadli Ilhami, Mukmin adilan, dan Randy Prathama.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari bapak/ibu dosen penguji untuk mengisi semua kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Amin yarabbal'alamiin.

Padang, Januari 2024
Penulis

Bintang Muhammad Iqbal
Npm : 201002111091

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial.....	14
1. Pengertian Dinas Sosial.....	14
2. Tugas Dan Kewenangan Dinas Sosial.....	14
3. Kewajiban Dinas Sosial.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Miskin.....	16
1. Pengertian Masyarakat Miskin.....	16
2. Kategori Masyarakat Miskin.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Masyarakat.....	19
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	19
2. Kesejahteraan Masyarakat.....	20
D. Tinjauan Umum Penyebab Kemiskinan.....	22
1. Ketidaksetaraan Ekonomi.....	22
2. Pendidikan Yang Tidak Merata.....	23
3. Kurangnya Pelayanan Kesehatan.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan-Tahapan Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	29
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	44
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia maka dibuatlah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam pengangkatan kesejahteraan masyarakat diIndonesia sendiri masalah kemiskinan banyak diperbincangkan karena merupakan masalah sosial yang ironis.¹

Pembangunan nasional pada negara berkembang masih menjadi titik fokus utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan dalam hal tingginya tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor yang dominan permasalahan. Dengan demikian, negara berkembang masih memiliki beberapa masalah yang harus diperhatikan berkaitan dengan kemiskinan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang dihadapkan dengan masalah kemiskinan. Hal yang paling mendasar yang umum dijumpai dalam suatu negara berkembang adalah ketidakseimbangan antar

¹ Jimly Asshiddi, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press: Malang, hlm. 22

jumlah penduduk dengan pendapatan sosial. Terkhusus Provinsi Sumatera Barat, merupakan provinsi yang cukup padat penduduknya dengan berbagai macam mata pencaharian. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan erat dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam masyarakat, Dinas Sosial memegang peran penting dalam melakukan tugas penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat yang membutuhkan. Dinas Sosial merupakan instansi yang bertugas memberikan pelayanan dan dukungan sosial kepada masyarakat. Sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Kesejahteraan sosial dalam arti luas merupakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia agar mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, Hal ini tidak hanya dilihat dari segi ekonomi dan fisik saja, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial mental dan segi kehidupan spiritual.² Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan yang terpenuhi dari segala bentuk kebutuhan hidup, yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan.³

² Isbandi Rukminto Adi, 2001, *Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, hlm. 4.

³ Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan dan Pekerja Sosial*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 1-3.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang telah lama dicari. Di era globalisasi dan perubahan yang cepat, banyak masyarakat di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, kesenjangan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta ancaman terhadap lingkungan alam. Di sisi lain, masyarakat yang sejahtera dapat secara signifikan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, stabilitas sosial, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi para anggotanya. Pentingnya kesejahteraan sosial semakin ditekankan ketika berbagai permasalahan global, seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan kesenjangan ekonomi, berdampak signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, dan merasakan fasilitas kesehatan. Kehidupan sejahtera di tandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. Masyarakat sejahtera dapat terwujud jika penduduk mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

⁴ Serafica Gischa, *Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/164114169/upaya-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat#google_vignette

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan memiliki tanggung jawab diantaranya dalam penanggulangan kemiskinan, hal ini senada dengan pendapat Dwi Astuti bahwa pemenuhan hak masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat.⁵ Salah satu tanggung jawab pemerintah ialah tentang penuntasan kemiskinan.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak ikut serta dalam menjalankan pembangunan atau menikmati hasil hasil pembangunan.⁶

Tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun secara sosial, masyarakat masih belum bisa memenuhi hidup yang sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kemiskinan di Indonesia menjadi satu persoalan yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan berbagai macam kebijakan

⁵ Dwi Astuti, 2021, *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan kemandirian Masyarakat*, <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs2.4.83/index.php/ensiklopedia/article/view/746>, hlm. 194.

⁶ Soegijoko, Budi Tjahjati S, dan BISA Kusbiantoro (ed), 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Soegijanto Soegijoko: Bandung, hlm. 137

pemerintah yang sudah di tetapkan, memang tidak semudah membalik telapak tangan bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, hal ini dikarenakan masalah kemiskinan lebih bersifat multi dimensi dari pada masalah lainnya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

Penanggulangan kemiskinan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tujuan dari rangkaian pembangunan nasional tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik saja melainkan juga mengupayakan perbaikan angka kemiskinan. Perubahan yang dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat setelah diperbaikinya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, mendapatkan pendidikan, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan.⁷ Kemiskinan adalah salah satu contoh dari masalah ekonomi.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan standar hidup rata rata masyarakat di suatu daerah tertentu.⁸ Kemiskinan juga ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik berupa papan, sandang dan pangan. Pada dasarnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak

⁷ Zubaedi, 2007, *Wacana Pembangunan Alternatif*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, hlm 18

⁸ Adam Ubaidilla, *Upaya Mengatasi dan Pengentasan Masalah kemiskinan*, <https://www.kompasiana.com/adam18881/616469c10101907d690b88993/upaya-mengatasi-dan-pengantasan-masalah-kemiskinan>

hanya sekedar tercukupinya kebutuhan akan papan, sandang dan pangan saja, tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan.⁹ Dalam esensi, masyarakat yang sejahtera memiliki kemampuan untuk mencapai potensi mereka secara penuh dan memiliki kualitas sosial yang lebih baik. Dengan demikian hal ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi pertumbuhan dan perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu ukuran agregat tingkat kemiskinan di suatu wilayah di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.¹⁰

Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang tahun 2022 pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mencatat angka kemiskinan tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir.¹¹ Sebagaimana tabel dibawah ini:

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mohammad Agung, 2001, *Kemiskinan di Perkotaan*, Penerbit Unissula Press: Semarang, hlm. 134.

¹¹ Redaksi, *BPS catat angka kemiskinan di Pessel tertinggi dalam 5 tahun terakhir*, <https://klikpositif.com/bps-catat-angka-kemiskinan-di-pessel-tertinggi-dalam-5-tahun-terakhir-ini-penyebabnya/>

Tabel 1.1

Data angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2017-2022

No.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	
		PERSENTASE	RIBU JIWA
1	2017	7,79%	35.530
2	2018	7,59%	34.920
3	2019	7,88%	36.510
4	2020	7,61%	35.460
5	2021	7,92%	37.140
6	2022	7,11%	33.780

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 37.140 ribu jiwa dan turun pada tahun 2022 dengan jumlah 33.780 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melakukan pengembangan potensi pariwisata baik peningkatan sarana dan prasarana maupun kesiapan masyarakat mendukung dan menerima kehadiran wisatawan. Dalam hal ini, berbagai ajang pameran dibuka setiap tahunnya baik di tingkat provinsi maupun nasional yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mempromosikan potensi daerahnya, dari ajang pameran ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat mendorong kemampuan daerah untuk memenangkan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.¹²

Hal itu dikarenakan agar Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan investasi dari pihak swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan berbagai potensi unggulan daerah, terutama pada sektor pariwisata, karena daerah Kabupaten Pesisir Selatan kaya akan potensi wisata yang bisa menarik perhatian pengunjung dan tentu bisa membuka lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan bagi masyarakat lokal.

Untuk mengatasi masalah naiknya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, tentunya dibutuhkan suatu usaha dari lembaga pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan untuk berusaha menekan angka kemiskinan melalui berbagai macam kebijakan pemberdayaan masyarakat. Usaha penanggulangan kemiskinan ini diwujudkan supaya masyarakat tersebut mendapatkan hidup yang layak dan dapat mengembangkan dirinya serta melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Secara teknis, ini merupakan tugas dan fungsi yang di jalankan oleh Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang

¹² Marlison, *Pemkab Pesisir Selatan kembangkan potensi pariwisata untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat*. <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/pemkab-pesisir-selatan-kembangkan-potensi-pariwisata--untuk-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NAGARI GUNUNG BUNGKUK LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan di Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.¹³ Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, 2012, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 28.

1. Untuk menganalisa tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanggulangan di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁴

2. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁵ Data primer adalah sumber data dan keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian dilapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data wawancara atau responden.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁶ Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan analisis kebijakan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kabupaten Pesisir Selatan. Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementrian Sosial
- 4) Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Deskontrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepala Dinsos Daerah Provinsi dan Dinsos daerah kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

¹⁶ Peter Mahfud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Grup: Jakarta, hlm. 181.

- 5) Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁷, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan lain sebagainya.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, penanya dan penjawab menggunakan alat yang dinamakan dengan *interview*

¹⁷ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, hlm. 31.

¹⁸ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

guide (panduan wawancara). Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informasi terkait dengan topik yang ingin diteliti oleh peneliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Dengan kata lain, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan Bapak Rahmadi selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, agar penggalan informasi berlangsung dapat lebih dalam.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola- pola tadi di analisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.¹⁹

¹⁹ Burhan Ashshofda, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.